

**MENGAGAS PENDIDIKAN BERWAWASAN KEWIRAUSAHAAN DI
PERGURUAN TINGGI ISLAM
(Studi Kasus Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten)**

Nur Hidayah
IAIN "SMH" Banten
e-mail: nurhidayah@gmail.com

Abstract

There has been a concern over a high unemployment rate among graduates of Islamic higher education and a low proportion of entrepreneurs in Indonesia. In fact, a high proportion of entrepreneurs is one of indicators of a country's welfare. This has generated a question: to what extent do Islamic values cultivate entrepreneurial culture among its adherents? How to cultivate entrepreneurial culture in Islamic higher education? This paper will investigate this matter using a case study of Faculty of Islamic Law and Economics at Banten State Institute for Islamic Studies.

The paper argues that the curriculum at the faculty of Islamic Law and Economics has not been oriented towards building entrepreneurial culture. The curriculum consists of subjects to enhance the students' competence and skills to prepare them as bachelors of syari'ah economics for the professions such as manager, lecturer, researcher, syari'ah auditor, etc, instead of preparing them for entrepreneurs who are capable to build his or her own business from the scratch.

To propose Islamic entrepreneurship study program at the FSEI of IAIN SMHB, it is important to have a strong political will not only from the internal IAIN but also higher authoritative body such as the Ministry of Religious Affairs to facilitate this from not only the accreditation process but also financial support. A further feasibility study needs to be undertaken to build its infrastructure such as qualified lecturers, appropriate curriculum structure, and recruitment student system. Since this field has a strong link with a 'real sector', there has been an urgent need to build cooperations with business sector to enable the students to undertake their apprentice and build their networks to facilitate their ability to develop their own business.

Keywords: Islam, entrepreneurship, entrepreneurial education.

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap tingginya tingkat pengangguran di kalangan para sarjana lulusan perguruan tinggi (Islam) dan masih rendahnya proporsi pengusaha di Indonesia. Padahal tingginya proporsi pengusaha dapat menjadi salah satu indikator kemakmuran sebuah negara. Oleh karena itu timbul pertanyaan sejauh mana nilai-nilai Islam mendorong budaya wirausaha di kalangan umatnya? Dan bagaimana budaya wirausaha ditumbuh-kembangkan di lembaga pendidikan tinggi Islam? Penelitian ini bersifat deskriptif eskploratif dengan studi kasus pendidikan kewirausahaan di *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN "SMH" Banten*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum prodi-prodi yang ada di FSEI belum sepenuhnya berwawasan kewirausahaan. Mahasiswa umumnya banyak dibekali dengan kompetensi dan ketrampilan yang mempersiapkan mereka sebagai sarjana ekonomi syari'ah yang akan mengisi profesi-profesi yang membutuhkan kompetensi di bidang ini seperti manajer, dosen, peneliti, dewan pengawas syariah, dan sebagainya, ketimbang profesi wirausahawan yang berkompetensi untuk merintis usaha dari bawah.

Untuk membangun prodi kewirausahaan Islam/bisnis syari'ah di FSEI IAIN SMHB dibutuhkan political will yang kuat dari tidak hanya pihak kampus tetapi juga lembaga otoritas seperti Diktis Kemenag untuk memfasilitasi berdirinya prodi ini baik dari segi perizinan maupun pendanaan. Studi kelayakan awal yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana seperti kebutuhan formasi dosen yang qualified di bidangnya, struktur kurikulum yang dapat membekali mahasiswa dengan berbagai karakter dan ketrampilan sebagai (calon) pengusaha handal, dan sistem perekrutan untuk menjaring calon mahasiswa unggul. Mengingat profesi ini sangat berhubungan erat dengan sektor rill, perlu dibangun berbagai kerjasama dengan dunia usaha yang dapat digunakan oleh mahasiswa tidak hanya sebagai 'laboratorium hidup' dari ilmu yang digelutinya, tetapi juga sarana membangun networking yang dapat memfasilitasi mereka berjejaring sehingga lebih memudahkan ketika akan memulai usahanya kelak.

Kata Kunci: Islam, kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan.

A. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang melanda dunia pada beberapa dekade terakhir menimbulkan kesadaran akan perlunya setiap negara di dunia untuk membangun fundamental ekonomi yang lebih kuat. Salah satu indikator ketangguhan dan kemajuan perekonomian suatu bangsa adalah besarnya prosentase penduduk yang menjadi pengusaha. Sektor kewirausahaan dipandang memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui penciptaan nilai tambah (added value) komoditas barang dan jasa. Sayangnya, di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2012 jumlah pengusaha baru mencapai 1,56% dari total penduduk Indonesia. Padahal menurut David Mc Lelland, seorang sosiolog pembangunan, suatu negara akan mencapai tingkat kemakmuran jika jumlah wira usahawannya minimal 2% dari total populasinya.¹ Meskipun presentase 1,56% ini terus meningkat belakangan ini, namun jumlah tersebut masih jauh tertinggal dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (12%), Jepang (10%), dan Singapura (7%). Selain tertinggal dari segi kuantitas, Indonesia juga tertinggal dari segi kualitas kewirausahaan, khususnya dari segi inovasi dan teknologi.

Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, timbul sebuah pertanyaan sejauh mana pengaruh nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, terhadap kultur masyarakat Indonesia untuk berjiwa wirausaha. Apakah nilai-nilai Islam mendorong umatnya untuk memiliki nilai-nilai kewirasahaan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau sebaliknya. Meskipun banyak faktor lain yang menentukan tinggi rendahnya proporsi pengusaha di sebuah negara, khususnya kondisi mikro dan makro ekonominya, namun nilai-nilai budaya, termasuk di dalam nilai-nilai keagamaan memiliki pengaruh yang cukup signifikan untuk terbentuknya perilaku dan kultur wirausaha, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian beberapa ahli.²

Salah satu wahana penting untuk menumbuh-kembangkan nilai-nilai kewirausahaan adalah lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan tinggi. Namun potret pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi Islam, masih memperlihatkan sisi yang tampaknya belum mampu menerjemahkan visi Islam sebagai agama pencerah dan pemberdayaan. Kualitas sistem pendidikan tinggi Islam belum mampu bersaing dengan sistem pendidikan tinggi umum. Potret lulusan pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi agama Islam, di Indonesia masih menunjukkan relatif tingginya tingkat pengangguran,³ yang merefleksikan belum optimalnya perguruan tinggi melakukan proses transformasi dari input, mahasiswa peserta didik, menjadi

output sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan berwawasan kewirausahaan semakin memperoleh momentum pada saat ini di berbagai belahan dunia, termasuk di tanah air. Namun sayangnya berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia belum memperlihatkan *political will* yang kuat untuk mengarahkan orientasinya ke arah ini. Program studi atau bahkan fakultas ekonomi Islam di banyak perguruan tinggi Islam umumnya hanya menawarkan mata kuliah-mata kuliah yang banyak diadopsi dari fakultas ekonomi konvensional untuk kemudian diinjeksi dengan nilai-nilai keislaman ataupun digabungkan dengan ilmu-ilmu keislaman tradisional.

Atas dasar inilah, tulisan ini berupaya menjawab permasalahan di atas dengan mencoba menawarkan konsep pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi Islam, khususnya di fakultas ataupun program studi yang relevan dengan dunia kewirausahaan. Tulisan ini didasarkan atas sebuah penelitian yang bersifat deskriptif-eksploratif, menggabungkan antara studi literatur dengan studi kasus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten (untuk selanjutnya disingkat FSEI IAIN “SMHB”). Pemaparan diawali dengan tinjauan mengenai hubungan antara Islam dan kewirausahaan, dilanjutkan dengan tinjauan terhadap konsep pendidikan kewirausahaan, selanjutnya pembahasan studi kasus, kemudian diakhiri dengan penutup.

B. Islam dan Kewirausahaan

A. Islam dan Kewirausahaan: Perspektif Normatif

Hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan budaya wirausaha masih menjadi bahan kajian dan diskusi menarik di kalangan para sarjana. Kajian mengenai pengaruh nilai-nilai keagamaan terhadap budaya kewirausahaan dipelopori oleh Max Weber.⁴ Ia berargumen bahwa kemajuan yang dialami oleh masyarakat Barat banyak diilhami oleh nilai-nilai agama Protestan yang bersifat rasional yang menjadi faktor kunci kelahiran ekonomi kapitalisme di masyarakat Barat. Semangat kapitalisme untuk mengakumulasi kekayaan inilah yang mendorong banyak umatnya menjadi wirausahawan. Sebaliknya, ia berargumen keterbelakangan ekonomi masyarakat Muslim dipengaruhi oleh nilai-nilai dan budaya Islam yang tidak mendorong kewirausahaan di kalangan umatnya. Sarjana lain seperti, Turner, menguatkan thesis Weber ini.⁵

Penelitian ini berupaya untuk melakukan ‘challenge’ terhadap thesis di atas. Sarjana seperti Weber dan Turner terkesan sangat ‘essensialis’ dalam memandang Islam. Mereka gagal mempertimbangkan perubahan dalam etika keagamaan akibat akulturasi Islam dengan budaya setempat yang terjadi

sepanjang sejarah Islam. Padahal kondisi inilah yang dianggap mengakibatkan semangat kewirausahaan Islam di masa awal mengalami distorsi dan degradasi yang berpengaruh negatif pada masyarakat Muslim di masa-masa berikutnya. Penelitian ini sebaliknya berangkat dari konsep Islam sebagai agama yang membawa visi keadilan (ekonomi) dan misi pemberdayaan ekonomi umatnya. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil `alamin*), Islam memberikan fungsi kepada manusia sebagai wakil Allah di muka bumi (*khalifatullah fil `ardh*) yang bertugas memakmurkan bumi (QS 6: 165; QS 11: 61). Untuk melaksanakan tugas ini, Islam menekankan pentingnya konsep pemberdayaan, termasuk pemberdayaan ekonomi, baik individu maupun kolektif (QS 13: 11). Salah satu jenis profesi yang melambangkan tugas ini adalah kewirausahaan, termasuk di dalamnya perdagangan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Dalam beberapa hadits, Nabi memuji profesi ini dan menganjurkan umatnya untuk menjadi wirausahawan.⁶ Oleh karena itu penelitian ini akan memperkuat penelitian-penelitian para sarjana yang berpendapat bahwa Islam kompatibel/sejalan dengan nilai-nilai kewirausahaan, sebagaimana disinyalir oleh Rodinson⁷, Wilson⁸, dan Akbar⁹.

Terkait dengan kewirausahaan, Qur'an dan Hadits memandangnya sebagai salah satu sumber penghidupan yang terbaik¹⁰ bahkan sangat dianjurkan. Beberapa ayat Qur'an mendorong manusia untuk berikhtiar dengan memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang tersedia, yang merupakan inti kewirausahaan.¹¹ Teks-teks Qur'an ini juga diperkuat oleh beberapa hadits Nabi yang menganjurkan umatnya untuk berprofesi sebagai wirausaha. Bahkan Nabi sendiri, di samping tugas kerasulannya, merupakan seorang wirausaha yang terkenal ulung dalam mengembangkan usahanya dan berintegritas tinggi. Nabi menganggap wirausaha merupakan profesi yang lebih mulia dibandingkan profesi lain, sebagaimana sabda Nabi: "jika kalian berdagang yang halal, maka pekerjaan kalian termasuk jihad, dan jika kalian menafkahkan hasil usaha tersebut untuk keluarga dan sanak saudara, maka pahalanya menjadi shadaqah, dan sesungguhnya satu dirham yang diperoleh dari perdagangan lebih baik dari sepuluh dirham yang diperoleh dari jalan lain." Hadits lain yang diriwayatkan Abu Sa'id menyatakan: "Seorang wirausaha yang jujur dan amanah akan ditempatkan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada."

Teks-teks tersebut menekankan dimensi etik bagi seorang Muslim dalam menjalankan profesi wirausahanya. Karena setiap Muslim bertanggung jawab atas semua amal perbuatannya kepada Allah, kesuksesan bisnis seorang wirausaha diukur tidak hanya dari segi materi, namun juga dari sejauh mana ia

mampu mewujudkan tujuan Islam, *maqasid al syari'ah* (tujuan tertinggi *syari'ah*: perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta).¹² *Maqasid al syari'ah* inilah yang akan menjadi pedoman bagi sang pengusaha Muslim dalam mengambil keputusan atau transaksi bisnis apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syari'ah*.

Prinsip utama yang melandasi filosofi bisnis dalam Islam adalah *Tauhid* (Keesaan Allah). Prinsip ini mengindikasikan Allah sebagai Pencipta Tunggal alam dan, oleh karenanya, semua manusia berkedudukan setara untuk bertugas melaksanakan perintah-Nya.¹³ Dalam bisnis, hal ini mengimplikasikan kejujuran dan amanah dan sebuah relasi antara pengusaha dan pekerja yang merefleksikan fakta bahwa mereka bagian dari persaudaraan sesama manusia dan secara spiritual setara di hadapan Allah, meskipun secara materi tidak setara di dunia.¹⁴ Hubungan yang setara inilah yang kemudian menjadi pondasi etika bisnis dalam Islam yang melandasi beberapa prinsip derivatif lainnya.

Penafsiran teks-teks Islam juga mendorong lahirnya lingkungan usaha ideal yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Akbar menggambarkan tipologi lingkungan usaha dalam sebuah masyarakat yang mengikuti ajaran Islam. Dalam masyarakat tersebut, pajak dan zakat yang dibayar oleh pengusaha Islam akan berkontribusi pada peningkatan pelayanan sosial yang akan memfasilitasi beroperasinya perusahaan dan meningkatkan permintaan terhadap produk-produknya. Negara akan membangun lembaga-lembaga, infrastruktur, dan sistem administratif yang membuka lapangan kerja dan menciptakan kekayaan, dan melakukan distribusi pendapatan yang adil di antara berbagai kelompok masyarakat, serta menjamin keamanan dan stabilitas. Hal ini semua akan semakin memfasilitasi berjalannya perusahaan. Sistem sosial semacam ini akan ditandai dengan masyarakat yang setara dan pribadi-pribadi yang kreatif, inovatif, dan pengharapan yang lebih besar pada hasil dari upaya-upaya kewirausahaan. Negara dengan sistem seperti ini akan memberi jaminan keamanan kepada dunia usaha.¹⁵ Inilah tipologi lingkungan usaha ideal yang dianjurkan oleh Islam.

B. Islam dan Kewirausahaan: Perspektif Historis-Sosiologis

Gambaran ideal di atas jika dibandingkan dengan kenyataan empiris kondisi dunia usaha di negara-negara Muslim menunjukkan gap yang sangat kontras. Umat Muslim jauh tertinggal dibandingkan umat lainnya dalam kemajuan usaha mereka. Kondisi perekonomian negara-negara Muslim umumnya masih dalam kategori berkembang, untuk tidak mengatakan

tertinggal. Rata-rata GDP mereka masih di rentang menengah ke bawah dalam peringkat dunia. Demikian pula, hanya terdapat lima dari 500 perusahaan terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasar versi FT Global yang berada di negara-negara Muslim. Ketidak-pastian hukum yang berasal dari dualisme hukum antara hukum *syari'ah* Islam tradisional dan hukum kontrak Barat menghambat investasi langsung asing (FDI/Foreign Direct Investment) di kebanyakan negara Muslim.¹⁶ Gerakan kelompok politik Islamis, yang cukup marak di negara-negara Muslim, umumnya dipandang negatif oleh dunia usaha, karena dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas, dan menambah tingkat resiko (investasi) negara yang bersangkutan.

Gap antara nilai-nilai normatif dengan kondisi empiris ini tentu menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah hal ini disebabkan sistem nilai dan ideologi Islam yang mendorong kewirausahaan, seperti didiskusikan di atas, tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha? Ataukah hal ini dikarenakan kurangnya koherensi dalam ideologi ekonomi Islam? Ataukah hal ini akibat dari kegagalan umat Islam dalam membangun lembaga-lembaga, sistem, dan prosedur yang mendukung usaha yang konsisten dengan ideologi Islam? Ataukah karena pengaruh ideologi lain di luar Islam yang mengganggu proses berkembangnya budaya wirausaha? Ataukah hal ini merupakan kombinasi dari semua faktor tersebut yang berkonspirasi melawan masyarakat Islam dalam merealisasikan potensi wirausaha mereka?

Tampaknya konfigurasi berbagai faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, sains dan teknologi telah berkontribusi terhadap munculnya konservatisme dalam masyarakat Islam pada abad pertengahan Islam yang kemudian menghambat tumbuh-kembangnya kecenderungan kewirausahaan di masa-masa selanjutnya yang sesungguhnya telah muncul di masa-masa awal Islam.¹⁷ Akbar mengkritik Weber yang mengatributkan keterbelakangan ekonomi umat Islam kepada nilai-nilai etika Islam semata. Menurut Weber gagal memperhitungkan perubahan etika keagamaan akibat akulturasi dengan budaya lain yang terjadi sepanjang sejarah.¹⁸ Peradaban Arab yang berevolusi sepanjang waktu telah dipengaruhi oleh beragam budaya seperti Byzantium, Persia, Eropa dan India, di samping budaya Arab sendiri, yang ditandai oleh dua budaya yang cukup kontras: budaya Badui yang dibentuk oleh suku-suku gurun dan budaya kota yang dibentuk oleh klan bangsawan Mekkah, umumnya berprofesi saudagar.¹⁹ Efek kontradiksi kedua budaya ini terasa sepanjang sejarah Islam, termasuk pada budaya wirausaha.

Sepeninggal Nabi, umat Islam menghadapi ancaman disintegrasi. Untuk menghadapinya, dibentuklah kelompok prajurit perang yang kuat, yang umumnya berasal dari suku-suku gurun yang telah tinggal di kota. Inilah asal muasal terwujudnya etika prajurit perang, yang menurut Weber, merupakan faktor utama yang menghambat kemajuan kapitalisme di masyarakat Islam.²⁰ Kelompok lain, birokrasi, juga muncul pada periode ini untuk menangani administrasi sipil wilayah-wilayah yang baru saja ditaklukan.²¹ Kelompok ini direkrut dari klan para penguasa, yang kemudian menumbuhkan kecenderungan nepotisme. Nepotisme tumbuh subur sejak Khalifah Utsman, dan akhirnya mengantarkan kemunculan sistem dinasti dalam Islam yang bertanggung jawab atas lahirnya apa yang disebut Weber sebagai ‘patrimonialism’—penghambat lain bagi kemunculan kapitalisme.²²

Kelompok sosial penting lainnya berasal dari massa, yang terdiri dari para ulama. Kelompok ini memberikan legitimasi kepada para sultan, sebagai kompensasi keengganan massa menerima para sultan sebagai penerus sah Nabi karena mereka tidak bisa mengklaim posisi mereka melalui garis keturunan, dan posisi mereka pun tidak diperoleh melalui pemilihan. Seiring semakin dipertanyakannya legitimasi posisi sultan, kelompok ulama tumbuh dan secara nyaman menemukan jalan menjadi birokrasi hukum kerajaan Islam. Meskipun seharusnya para ulama menjadi penjaga murni aqidah Islam, mereka malah harus berkompromi dengan berbagai praktik tidak etis yang dilakukan para sultan sebagai imbalan atas keamanan dan stabilitas masyarakat Islam. Pada masa selanjutnya, kelompok ulama ini berubah menjadi kelompok yang sangat konservatif, menolak berbagai perubahan dengan kekhawatiran akan merusak tatanan masyarakat Islam.²³

Sementara itu, kemajuan pedagang Arab terus tak terbendung pada masa awal dan klasik Abbasiyah. Dengan perluasan kerajaan, horison bisnis mereka juga meluas. Mereka sangat aktif sehingga perjalanan dagang mereka sering mendahului kemajuan kelompok prajurit perang ke banyak wilayah yang kemudian tunduk di bawah kontrol militer. Para pedagang Arab, misalnya, telah mencapai pesisir India selatan sebelum masuknya Ibnu Quasim ke Sindh pada 712 M. Mereka juga beroperasi di Indonesia, Malaysia dan China. Banyak di antara mereka menikah dan menetap secara permanen di daratan-daratan yang jauh ini. Mereka terkenal dengan kejujuran, integritas dan transaksi bisnis yang beretika. Aktifitas mereka menghasilkan perluasan perdagangan dan bisnis yang besar.²⁴

Perluasan ini mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah (700-1000 M). Kebangkitan peradaban Arab-Islam menyentuh hampir semua aspek kehidupan: bahasa, sastra, ilmu pengetahuan, kedokteran, industri, perdagangan dan industri. Oleh karenanya Turner berkesimpulan bahwa masa klasik Abbasiyah merupakan masa perluasan wilayah, perdagangan, dan budaya yang sangat cepat.²⁵

Namun, pada saat serangkaian aksi yang berorientasi pada pasar menciptakan institusi dan nilai-nilai baru (kejujuran dan kecermatan) sejalan dengan ideologi Islam, kebanyakan struktur kesukuan, nomaden, dan pedesaan yang ada dibiarkan tak berubah, dan sektor kapitalis jelas-jelas terhambat,²⁶ karena kaum *bourgeois* Muslim tidak pernah mendapatkan posisi politik. Konsekuensi dari kontradiksi ini mulai tampak sekitar awal abad ke-11 M. Sejak saat itu dominasi politik dipegang oleh tentara Turki (yang berasal dari) budak, yang selanjutnya mengurangi signifikansi kelas bisnis, yang mengakibatkan menciutnya sektor kapitalis. Pada masa inilah peradaban Islam mulai mengalami masa kemunduran. Para elit hidup dalam kemewahan dan mengalami degenerasi ke kehidupan yang memelihara selir dan perdagangan budak. Tak lama kemudian kaum aristokrat Arab digantikan oleh hirarki pejabat yang merepresentasikan berbagai negara, umumnya Persia dan kemudian Turki.²⁷

Tradisi keilmuan pada masa itu, seperti pembuatan perhiasan dan bentuk kerajinan lainnya, dianggap hanyalah urusan keluarga dan diturunkan dari ayah ke anak. Hal ini menyebabkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berkembang dan melembaga, yang pada akhirnya menghambat berkembangnya kapitalisme rasional. Industri, pertanian, perdagangan dan kekuatan militer mengalami kemunduran. Di wilayah agama, inovasi justru dianggap sebagai *bid'ah* (penyimpangan). Penggunaan rasio dan rasionalitas Islam membukakan pintu untuk imitasi (*taqlid*). Karena tidak mampu memberi makan tentara, para sultan memerintahkan pengambilan pajak kepada pemimpin tentara, merongrong sistem moneter (karena pajak dibayar sesuai keinginan pimpinan tentara). Prajurit profesional berubah menjadi tuan tanah yang feodal yang akan memelihara tentaranya sendiri dan memberikan bantuan militer kepada Khalifah sebagai ganti hak memungut pajak. Sistem ini menjadikan pertanian mundur karena pajak yang terlalu tinggi. Karena tidak ada lagi perluasan wilayah, tingkat pajak bertambah secara besar-besaran. Muncul banyak ketidak-puasan di kalangan massa, yang mendorong timbulnya mistisisme Muslim, disertai

pondok-pondok sufi yang tidak produktif. Etika bisnis Islam jelas-jelas mengalami kemunduran.²⁸

Menyimpulkan situasi setelah tahun 1250, Turner menggambarkan dengan sangat baik:

Apapun prestasi intelektual dan spiritual periode ini, masa ini dikarakteristikan dengan kemunculan feodalisme prebendal dan konsolidasi dominasi patrimonial. Pada masa akhir abad pertengahan Islam, feodalisasi semakin parah dengan tumbuhnya kekuasaan politik kaum militer, namun feodalisme ini juga bersifat terdesentralisasi karena kedaulatan universal khilafah Baghdad telah hancur. Pada masa tiga kerajaan (Utsmani, Safawi, dan Mogul), para sultan kerajaan Utsmani menguasai Timur Tengah, Balkan, dan kebanyakan wilayah Eropa. Namun demikian, kemunduran kerajaan Utsmani dan dengannya kemunduran masyarakat Islam dapat dideteksi sejak masa Sultan Sulaiman II. Pada abad ke-16 dan ke-17 inilah keseimbangan kekuatan militer antara Kristen dan Islam mulai berubah sampai kerajaan Utsmani tidak dapat membiayai belanja militernya yang membengkak dan tidak mampu mempertahankan kesetiaan politik para prajuritnya.²⁹

Penciptaan ekonomi semi feodal, ketidak-pastian hak-hak properti dan kemunduran perdagangan memberikan pengaruh buruk terhadap kelas menengah Islam. Kelas menengah tidak memiliki posisi sosial yang baik dalam struktur militer-patrimonial masyarakat Utsmani. Di bawah kepemimpinan Utsmani, struktur sosial terdiri dari dua tingkatan utama, *`askeri* (militer, pegawai negeri, Ulama), dan *ri`ayah* (para pembayar pajak baik Muslim dan non-Muslim). Di antara *`askeri* dan *ri`ayah*, tidak ada kelas sosial atau lembaga-lembaga perantara. Singkatnya, ini sebuah masyarakat yang tanpa sebuah ‘civil society’. Demikian pula, kerajaan Utsmani hanya mengakui empat pekerjaan utama: pegawai negeri, agamawan, militer dan petani.³⁰

Sebagai akibatnya, perdagangan dan industri semakin ditinggalkan dan diambil-alih oleh warga non-Muslim—Yahudi dan Nasrani. Sejak abad ke-16, sentimen anti-Semit bergaung di wilayah Utsmani dan perdagangan internasional jatuh di tangan orang Yunani Ortodox yang berperan sebagai perantara antara Islam dan Eropa Kristen. Para pemegang jabatan dalam rumah tangga kerajaan hanya dapat melihat dengan perasaan iri pekerjaan tersebut yang telah distigmatisasi sebagai pekerjaan yang cocok untuk orang kafir. Meskipun beberapa saudagar Muslim membuat keuntungan bisnis yang besar,

peran sosial dan posisinya terbatas di luar kekuasaan politik. Saudagar Nashrani tidak hanya mengisi gap dalam masyarakat Utsmani tetapi juga menikmati perlindungan dari kekuasaan Eropa yang khususnya setelah perjanjian Passarowitz (1718), mulai menunjukkan pengaruh besar terhadap urusan dalam negeri kerajaan Utsmani. Kelas menengah asing ini sangat tidak disukai oleh para saudagar Muslim, dan umumnya dilecehkan oleh professional dan intelektual Muslim yang beranggapan bahwa menjadi pegawai pemerintah sebagai satu-satunya pekerjaan yang terhormat untuk kelas sosial mereka.³¹

Semua ini memberikan pengaruh terhadap etika bisnis pengusaha Muslim. Ketika masa awal dan klasik Abbasiyah pengusaha Muslim muncul sebagai pengusaha yang jujur, bersemangat Islam, dan secara sosial bertanggung jawab, pada abad ke-13, ia memperoleh reputasi sebagai pengusaha licik, pengekor, penuh tipu muslihat, senang berkelahi dan kasar. Ibnu Khaldun mendefinisikan tipikal pengusaha di masa ini sebagai pengusaha yang berusaha kemanapun dan kapanpun untuk menghalalkan segala cara. Rodinson mendapati bahwa pengusaha ini tidak menunjukkan ‘empati kemanusiaan kepada para pegawainya’.³² Tentu saja, ini sangat jauh dengan tipe ideal pengusaha Islam. Di samping itu, kebanyakan komoditas yang diproduksi dan diperdagangkan diarahkan kepada kebutuhan mewah kaum elit. Prilaku seperti ini dapat dijelaskan hanya dalam terminologi etika dan nilai-nilai kontemporer sistem sosial yang lebih luas. Lalu dapatkah budaya wirausaha Islam yang progresif yang telah berkembang pesat di masa awal Islam ditumbuh-kembangkan kembali lewat pendidikan kewirausahaan? Hal inilah yang akan coba dijawab di bawah ini.

C. Pendidikan Kewirausahaan

1. Konsep Pendidikan Kewirausahaan

Meskipun tidak terdapat definisi kewirausahaan atau wirausaha yang dapat diterima secara universal, namun terdapat kesepakatan umum bahwa kewirausahaan perlu didefinisikan lebih luas dari sekedar manajemen bisnis. Sarjana otoritatif yang sering direfer seperti Shane dan Venkataraman menyatakan: ‘[K]ami mendefinisikan bidang kewirausahaan sebagai pengujian ilmiah mengenai bagaimana, oleh siapa, dan dengan efek seperti apa peluang untuk menciptakan barang dan jasa di masa yang akan datang ditemukan, dievaluasi dan dieskplotasi.’³³ Dari definisi ini, terlihat unsur kewirausahaan ditekankan pada kemampuan berinovasi karena pada dasarnya inti kewirausahaan terletak pada kreatifitas, keberanian mengambil resiko, dan

inovasi. Sayangnya, sikap-sikap ini umumnya tidak ditumbuh-kembangkan dalam lingkungan sekolah bisnis tradisional.³⁴

Mengambil dari Sahlman and Stevenson (1992), Kourilsky menyatakan bahwa ciri kewirausahaan sejati ditandai dengan 3 karakter: kesadaran akan peluang pasar dan pembangkitan ide bisnis (jasa atau produk) untuk merespon peluang tersebut; organisasi dan komitmen sumber-sumber daya dihadapkan pada resiko untuk mengembangkan peluang bisnis; dan penciptaan sebuah organisasi bisnis yang beroperasi untuk mengimplementasikan ide bisnis yang dimotivasi oleh peluang tersebut.³⁵ Oleh karena itu, menurut Kourilsky pendidikan kewirausahaan berintikan pada pengidentifikasi kesempatan bisnis, mengorganisasikan sumber-sumber daya yang ada sambil manage resiko, dan membangun sebuah usaha bisnis.³⁶

Namun demikian beberapa pakar lain berupaya mendefinisikan pendidikan kewirausahaan dengan skop yang lebih luas. Gottlieb dan Ross mendefinisikan pendidikan kewirausahaan sebagai kreatifitas dan inovasi yang diaplikasikan dalam ranah sosial, pemerintahan dan bisnis.³⁷ Jones dan English mendefinisikan pendidikan kewirausahaan sebagai pengajaran ketrampilan dan penumbuh-kembangan karakter kepada para individu yang akan memberi mereka kemampuan untuk mengembangkan rencana-rencana baru yang inovatif.³⁸ Timmons mendefinisikan “Kewirausahaan sebagai kemampuan untuk membuat aksi dan membangun sesuatu dari yang secara praktis tidak ada sama sekali. Kewirausahaan adalah menginisiasi, melakukan, mencapai, dan membangun sebuah usaha atau organisasi, ketimbang hanya menyaksikan, menganalisa, atau menggambarkan sesuatu. Kewirausahaan adalah ketrampilan untuk melihat peluang ketika orang lain justru melihatnya sebagai kekacauan, kontradiksi dan kebingungan ...”³⁹

Terlihat perbedaan di antara para pakar mengenai apakah pendidikan kewirausahaan berlingkup hanya pada penciptaan lembaga usaha/bisnis ataukah berskala luas untuk menumbuh-kembangkan perilaku kreatif dan inovatif yang bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Penelitian ini akan berupaya mengambil posisi sejalan dengan konsep pendidikan kewirausahaan yang berskup luas, dengan tanpa meninggalkan esensi pendidikan kewirausahaan secara ekonomi yang berupaya menciptakan sarjana yang trampil menumbuh-kembangkan usaha/bisnis yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

Terkait atribut utama dari usahawan berupa kreatifitas, inovasi dan keberanian mengambil resiko, terdapat perdebatan di kalangan para pakar,

apakah kewirausahaan dapat diajarkan ataukah ia merupakan talenta bawaan. Kelompok pertama, seperti David Birch, berpendapat bahwa kewirausahaan cenderung sulit untuk diajarkan.⁴⁰ Karakteristik pengusaha yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko dianggap merupakan talenta bawaan yang tidak terdapat dalam diri semua orang. Kelompok ini adalah mazhab Schumpeter yang beranggapan bahwa pengusaha adalah mereka yang memiliki bakat menciptakan peluang bisnis dan inovasi dari ketidakseimbangan ekonomi. Namun demikian sebagian besar para sarjana berpendapat bahwa kewirausahaan dapat diajarkan dan ditumbuh-kembangkan melalui serangkaian proses pendidikan dan pelatihan yang harus pula ditunjang dengan lingkungan yang kondusif.⁴¹ Ini adalah mazhab Austria yang berpendapat bahwa kemampuan wirausahawan ditentukan pada kemampuannya mengidentifikasi peluang bisnis dan menindak-lanjutinya.⁴² Penelitian ini pun akan mengambil posisi yang sejalan dengan pendapat terakhir ini yang juga merupakan pendapat mayoritas.

2. Kurikulum Pendidikan Kewirausahaan

Dalam literatur, terdapat banyak keragaman pendapat mengenai bagaimana kurikulum pendidikan kewirausahaan sebaiknya dirumuskan. Berangkat dari kritik atas paradigma lama pendidikan bisnis yang menekankan aspek komersial, Kirby merekomendasikan perubahan paradigma pendidikan kewirausahaan dengan menekankan pada pendidikan kreatifitas dan inovasi, dengan merubah muatan mata kuliah, proses belajar, dan tempat belajar.⁴³ Untuk muatan mata kuliah, perubahan dilakukan dengan pengembangan ketrampilan, karakter, dan perilaku wirausaha. Mengikuti Ray, serangkaian ketrampilan yang perlu diajarkan dalam pendidikan kewirausahaan, meliputi ketrampilan-ketrampilan: komunikasi, khususnya persuasi; kreatifitas; berfikir kritis dan evaluatif; kepemimpinan; negosiasi; pemecahan masalah; networking sosial; dan manajemen waktu.⁴⁴

Perubahan muatan mata kuliah ini saja tidak cukup. Menurut Kirby, perubahan mata kuliah ini perlu juga dilengkapi dengan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang merubah cara mahasiswa belajar dan memperkuat pengembangan tidak hanya ketrampilan, tetapi juga kemampuan mereka untuk 'bertanggung jawab' terhadap masa depannya dan mengatasi ambiguitas dan ketidak-pastian, jika bukan resiko.⁴⁵

Oleh karena itu, Kirby mengkritik kebanyakan sistem pendidikan formal yang sejak masa Yunani kuno cenderung mengembangkan kemampuan otak-kiri siswa. Ia mengutip Lewis menyatakan:

Di kelas, siswa diharapkan memperoleh pengetahuan selangkah lebih maju dalam satu waktu, secara metodis menambah berbagai fakta pada rumah penampungan (otak) mereka hingga mereka mencapai level cukup untuk lulus dalam ujian. Hal ini membutuhkan ketrampilan otak kiri. Masalahnya siswa yang diminta untuk menyelesaikan persoalan ini sering dituntut memakai pendekatan analitik ketimbang intuitif. Hal ini, juga ... merupakan sebuah tugas otak kiri.... Para siswa yang dianggap paling pandai dan berhasil adalah mereka yang berjuang mencapai tujuan akademis, dapat mengontrol emosi mereka dalam kelas, mengikuti instruksi, tidak bertanya pertanyaan aneh, tepat waktu dan menyerahkan tugas kelas mereka tepat waktu. ... Semua ini, lagi-lagi tentu saja, merupakan tugas yang menjadi keahlian otak kiri.⁴⁶

Sejalan dengan ini, sebuah riset awal yang dilakukan Nieuwenhuizen dan Groenwald, di Afrika Selatan, tentang profil preferensi otak wirausahawan, justru mengkonfirmasi preferensi berfikir otak kanan para pengusaha sukses, yang tampaknya menjelaskan mengapa banyak pengusaha sukses diketahui justru tidak berhasil dalam sistem pendidikan formal dan bersifat dyslexic.⁴⁷ Itulah mengapa Gibb (1987), tampaknya secara intuitif, berpendapat bahwa untuk menumbuhkan pengusaha atau individu bermental pengusaha, fokus sistem pendidikan perlu bergeser dari tradisional menjadi apa yang diistilahkannya sistem pendidikan (karakter) 'kewirausahaan'.⁴⁸ Jadi, tantangannya adalah mengembangkan sebuah sistem belajar (dan juga evaluasi) yang melengkapi sistem pendidikan tradisional dan mengembangkan pada diri mahasiswa ketrampilan, karakter, dan perilaku usahawan.

Terkait dengan hal ini, Olsen dan Bosserman mengkarakterkan pengusaha dengan tiga atribut: berorientasi peran dengan menekankan efektivitas, berkemampuan untuk berfikir baik secara intuitif maupun rasional, dan bermotivasi dengan memiliki kekuatan tekad di balik aksinya.⁴⁹ Di antara atribut-atribut tersebut, yang paling sulit ditumbuh-kembangkan dari perspektif sistem pendidikan secara umum dan sekolah bisnis secara khusus adalah kemampuan untuk berfikir baik secara intuitif maupun rasional—untuk menumbuh-kembangkan apa yang diistilahkan 'otak yang berimbang'. Sebagaimana telah didiskusikan, kebanyakan sistem pendidikan cenderung mengadopsi pendekatan otak kiri untuk pembelajaran. Penekanannya pada penumbuh-kembangan kemampuan berfikir kritis atau vertikal. Ini adalah fungsi otak kiri—bersifat obyektif, analitik dan logis, dan menghasilkan satu, atau

paling banyak, hanya beberapa jawaban. Sebaliknya, berfikir kreatif bersifat lateral, menghasilkan solusi lebih dari satu yang bersifat imajinatif, dan emosional, melalui asosiasi.⁵⁰

Selain perubahan muatan mata kuliah dan proses belajar, dibutuhkan pula perubahan tempat belajar. Mengingat tujuan pendidikan kewirausahaan di atas, universitas belum disiapkan untuk memenuhi tuntutan pendidikan kewirausahaan. Kendala-kendalanya meliputi belum adanya budaya kewirausahaan, staff sering secara filosofis menentang tujuan ini dan mungkin tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan, kendala jadwal waktu kuliah yang terbatas dan juga desain tempat kuliah.⁵¹ Tak mengherankan, dengan kondisi demikian, Johannisson menyatakan: ‘untuk mengajari seseorang untuk menjadi tidak hanya seorang wriausahawan tetapi juga bisnisman ... adalah sebuah usaha yang menuntut komitmen waktu dan skup di luar kapabilitas sebuah sekolah bisnis akademik.’⁵²

Namun bagusnya, kendala-kendala ini masih dapat diatasi meskipun tentu saja dibutuhkan usaha yang tidak mudah untuk melakukan transformasi signifikan tidak hanya mengenai apa yang diajarkan tetapi juga bagaimana mengajarkannya.⁵³ Dalam konteks inilah, dan juga mengingat pentingnya melibatkan mahasiswa untuk memecahkan masalah dalam situasi yang sesungguhnya, dan mendorong mereka memformulasikan keputusan berdasarkan data yang bersifat spontan, tidak komplit, tidak pasti, dan ditimbulkan secara personal, maka pantas Albert dan Gaynor menyatakan bahwa “inkubator akan menjadi sekolah kewirausahaan di masa yang akan datang”.⁵⁴

Lalu bagaimanakah struktur kurikulum pendidikan kewirausahaan? Berdasarkan studi literatur dan survey terhadap 128 program studi kewirausahaan di tingkat universitas seluruh dunia yang dilakukan oleh Vesper dan Gartner,⁵⁵ Tujuan yang digambarkan dalam tabel I diadopsi sebagai basis membuat sebuah struktur kurikulum di Universitas Tasmania. Hai ini terdiri dari dua tujuan yang beroperasi secara paralel. Tujuan pertama berfokus pada pengembangan personal para mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan menempatkan kewirausahaan dalam perspektif dan meminta mereka mempertimbangkan peran pengusaha dibandingkan dengan prilaku dan ketrampilan yang mereka miliki. Tujuan kedua berfokus pada pengetahuan dan ketrampilan yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan dari proses awal menemukan kesempatan bisnis hingga memanen keuntungan.

Tabel I. Tujuan Pengembangan Personal dan Perusahaan

Pengembangan Personal	Pengembangan Perusahaan
Konsep Kewirausahaan	Identifikasi dan Evaluasi Kesempatan Bisnis
Karakteristik Pengusaha	Komersialisasi sebuah Konsep
Nilai Kewirausahaan	Pengembangan Strategi Memasuki Bisnis
Kreatifitas dan Ketrampilan Inovasi	Pengembangan sebuah Rencana Bisnis
Evaluasi Diri atas Etika dan Kewirausahaan	Menemukan Modal
Networking, Negosiasi dan Bertransaksi	Menginisiasi Bisnis Menumbuh-Kembangkan Bisnis Memanen Keuntungan

Lebih jauh dari para pakar sebelumnya, Hindle berupaya menawarkan landasan filosofis yang lebih mendalam terhadap pendidikan kewirausahaan di tingkat universitas. Penelitiannya sejalan dengan McMullan dan Long yang berpendapat bahwa metode yang sekarang digunakan untuk menyampaikan pendidikan kewirausahaan dinilai tidak cukup. Bidang ilmu baru ini perlu memperluas diri dari sekedar batasan-batasan sekolah manajemen atau teknik, bahkan sekat-sekat universitas.⁵⁶ Menurut mereka, kewirausahaan membutuhkan metode dan lingkungan pengajaran yang eksperimental, yang secara fundamental berbeda dengan orientasi tipikal sekolah bisnis dari cara materi diajarkan dan dievaluasi. Oleh karena itu, Hindle berargumen bahwa pendidikan kewirausahaan di tingkat universitas harus melampaui sekedar mengajarkan aspek vokasionalnya (komponen praktiknya) semata.⁵⁷ Mengambil dari pendapat Whitehead yang menyatakan bahwa fungsi sebuah universitas adalah memberikan kemampuan sivitas akademiknya untuk menyoroti detail-detail dengan tetap memprioritaskan prinsip, sebagaimana pernyataannya:

“Justifikasi terhadap keberadaan universitas adalah kemampuannya mempertahankan hubungan antara pengetahuan dan antusiasme untuk kehidupan, dengan menyatukan kaum muda dan kaum tua dalam pertimbangan imajinatif untuk belajar. Universitas menyebarkan informasi, namun ia menyebarkannya secara imajinatif. Setidaknya, inilah fungsi yang harus dijalankan universitas dalam masyarakat. Universitas yang gagal menjalankan fungsi ini tidak memiliki alasan untuk tetap eksis.”⁵⁸

Prinsip inilah yang kemudian disebut Hindle sebagai ‘prinsip transendental vokasional’.⁵⁹ Dengan prinsip ini, menurut Hindle, universitas merupakan tempat yang pantas untuk mempelajari kewirausahaan namun untuk mereka yang ingin mempertimbangkan fenomena ini secara imajinatif ketimbang sekedar mekanistik.

Lalu bagaimana memenuhi panggilan untuk ‘mempromosikan pertimbangan imajinatif berbagai prinsip umum yang melandasi ‘kewirausahaan’? Untuk menjawab ini, Hindle merekomendasikan apa yang disebutnya sebagai ‘menjawab tantangan zona plus/meeting the plus-zone challenge’.⁶⁰ Ia merupakan tantangan untuk mentransendentalkan detail dan spesifikasi dari aspek praktik dalam kurikulum kewirausahaan dan upaya untuk melakukan sesuatu yang unik dan berharga bagi pengembangan jiwa dan intelektual setiap mahasiswa. Menurut Hindle, program pendidikan kewirausahaan agar benar-benar bermakna dalam seting universitas, membutuhkan tantangan intelektual agar lebih dari sekedar training dan dapat mengklaim untuk bersifat pendidikan. Tantangan ini berkisar seputar filosofis, kritik subyek, dan kritik diri. Hindle berkeyakinan bahwa kewirausahaan, sebagai sebuah fenomena sosial besar dan perilaku manusia yang sangat penting, dapat memberikan landasan untuk pembelajaran yang dapat mentransendenkan fungsinya yang sangat spesialis dan melakukan sesuatu bagi pengembangan total manusia yang mempelajarinya. Kesempatan langka mempelajari sesuatu yang universal dari kajian yang mendalam terhadap sesuatu yang spesifik merupakan hal yang menjadi pembeda universitas dari lembaga pendidikan lain, sebagaimana akar kata universitas itu sendiri, universality. Oleh karena itu, menurut Hindle, setiap subyek spesifik dalam kurikulumnya tidak hanya harus bersifat penting bagi kemanusiaan tetapi juga bersifat transenden, sehingga dapat memperluas cakrawala kemanusiaan para mahasiswanya. Jadi plus zone rekomendasi Hindle merupakan wilayah dimana perhatian kurikulum harus diberikan untuk mentransendenkan hal-hal spesifik yang vokasional dalam rangka mencari prinsip-prinsip yang umum. Atas dasar itulah, Hindle berpendapat bahwa pendidikan kewirausahaan harus diajarkan di tempat dimana kondisi utama berupa transendental imajinatif dari aspek vokasional dipenuhi. Para dosennya pun harus terdiri dari tim program yang berkualitas dan berkomitmen yang memiliki keseimbangan antara teoritis dan praktisioner. Para mahasiswanya pun adalah mereka yang memahami prinsip transendental aspek vokasional dari kewirausahaan. Materi-materinya pun harus diajarkan atas dasar enam prinsip: eksperiensial (berdasarkan eksperimen), kreatif, penuh

kegembiraan, penuh penghormatan, adaptif, dan memakai prinsip kewirausahaan. Kurikulumnya pun harus berdasarkan prinsip ‘vocational transcendence’ dengan pendekatan desain kurikulum berupa roda yang dibangun atas empat lingkaran yang saling mewadahi. Program pendidikan kewirausahaan harus dimulai dengan menyadari pentingnya hubungan langgeng dengan dunia bisnis yang sesungguhnya. Network, lembaga-lembaga mitra, mentor, dan alumni semuanya berperan penting untuk menjamin agar program ini tidak terjebak dalam ‘mentalitas menara gading’. Lingkaran selanjutnya adalah template kurikulum yang berisikan mata kuliah-mata kuliah. Kebanyakan mata kuliahnya hampir sama dengan materi MBA berupa fungsi-fungsi seperti pemasaran, perilaku organisasi, keuangan, akuntansi dan strategi. Namun ada mata kuliah-mata kuliah lain yang spesifik untuk kewirausahaan seperti evaluasi peluang bisnis, manajemen kreatifitas dan komersialisasi properti intelektual. Saling keterkaitan antar mata kuliah ini terjadi ketika kesemuanya di konversi menjadi mata kuliah inti, perencanaan bisnis. Inilah lingkaran ketiga. Sedangkan di lingkaran tengah inilah letak mata kuliah ‘plus-zone’ yang diinfus dengan elemen pemikiran yang lebih bersifat reflektif.⁶¹ Tampaknya pendidikan model Hindle inilah yang bersifat lebih komprehensif dengan memberikan landasan filosofis bagi pendidikan kewirausahaan di tingkat universitas.

Namun demikian, dalam konteks perguruan tinggi Islam, kurikulum kewirausahaan konvensional ini perlu disintesiskan dengan konsep kewirausahaan berlandaskan Islam sebagaimana dibahas di bagian 2. Hal ini untuk menghindari terjadi kasus-kasus *business fraud* akibat *moral hazard* sebagaimana beberapa kasus bisnis konvensional yang menimbulkan tidak hanya eksploitasi (*dzulm*) tetapi juga menjalar ke krisis ekonomi makro negara bahkan global. Dengan dimensi etika Islam, pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi Islam diharapkan dapat melahirkan pengusaha yang handal dalam berbisnis sekaligus beretika moral dalam rangka mewujudkan misinya sebagai *khalifah* di muka bumi untuk menciptakan kemaslahatan bagi alam semesta.

3. Pedagogi Pendidikan Kewirausahaan

Setelah membangun sebuah kerangka kerja konseptual untuk mempelajari kewirausahaan, langkah selanjutnya adalah mendesain sebuah program penyampaian materi yang sesuai. Program penyampaian didasarkan atas model yang disebut sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dimana para mahasiswa memiliki sejumlah kewenangan atas bagaimana mereka belajar,

kapan mereka belajar, dan dimana mereka belajar. Tidak seperti strategi mengajar yang tradisional, sistem ini merupakan sebuah proses belajar yang lebih mendalam. Sistem ini meliputi aktifitas kolaboratif, tugas yang berdasar tujuan, penemuan intelektual, aktifitas yang meningkatkan kemampuan berfikir, dan aktifitas yang menyediakan praktik dalam ketrampilan-ketrampilan belajar. Tujuan pedagogi semacam ini adalah menciptakan sebuah lingkungan dimana para mahasiswa didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses kewirausahaan ketimbang sekedar membaca mengenai hal ini.

Konsep pedagogi di atas perlu dijabarkan menjadi strategi pengajaran kewirausahaan yang baik. Di samping itu, perlu pula diciptakan lingkungan belajar yang dapat merubah cara belajar mahasiswa dan memperkuat pengembangan tidak hanya ketrampilan, tetapi juga kemampuan mereka untuk ‘bertanggung jawab’ terhadap masa depan mereka, dan menanggulangi berbagai ambiguitas dan ketidak-pastian, jika bukan resiko.

Proses belajar yang bersifat eksperient (*experiential learning*) perlu ditumbuh-kembangkan dalam pendidikan kewirausahaan. Karena ketrampilan berfikir seimbang antara otak kanan dan otak kiri sangat dibutuhkan bagi para (calon) pengusaha, maka metode pembelajarannya pun perlu dirancang sehingga kedua wilayah otak tersebut dapat diaktifkan. Berbagai metode perkuliahan yang dapat diadopsi dalam kelas semacam ini seperti seminar, workshop, studi kasus, diskusi kelompok, proyek, presentasi, debat, interview, simulasi, role play, video interaktif, permainan internet, kompetisi, drama, investigasi, observasi, traning penjelajahan, penyuluhan, dan mentoring.⁶²

Para mahasiswa kewirausahaan perlu didorong untuk berani mengambil inisiatif dalam melakukan percobaan pilot project usaha mereka serta menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dari usaha tersebut. Inilah mengapa para sarjana seperti Gibb dan Hindle menganjurkan bahwa mahasiswa kewirausahaan harus bereksperimen bisnis melalui pemagangan dan inkubator bisnis.⁶³ Melalui pedagogi semacam ini, para mahasiswa kewirausahaan diharapkan dapat belajar sambil bereksperimentasi sehingga mereka dapat membangun karakter dan ketrampilan sebagai pengusaha yang handal sejak awal perkuliahan.

D. Studi Kasus di IAIN “SMH” Banten

1. Kondisi Obyektif Pendidikan berwawasan Kewirausahaan di FSEI IAIN “SMH” Banten

Setelah melakukan observasi terhadap kurikulum program-program studi yang berkaitan dengan ekonomi Islam, seperti Hukum Ekonomi Syari'ah, Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah, Asuransi Syariah, terlihat dari sebaran mata kuliah, program ini belum berwawasan kewirausahaan. Setiap prodi membekali para mahasiswa dengan matakuliah-matakuliah kompetensi dasar (sekitar 22%), kompetensi utama (sekitar 65%), dan kompetensi pendukung (sekitar 13%). Kompetensi dasar didominasi mata kuliah-mata kuliah yang memperkenalkan kompetensi dasar sebagai sarjana yang berbasis ilmu keislaman tradisional dan keindonesiaan. Kompetensi utama didominasi oleh mata kuliah-mata kuliah yang merupakan kombinasi kompetensi sarjana ekonomi konvensional dan sarjana ekonomi Islam. Pada kluster ini, mahasiswa banyak dibekali dengan kompetensi dan ketrampilan yang akan mempersiapkan mereka sebagai sarjana ekonomi syariah yang akan mengisi profesi-profesi yang membutuhkan kompetensi di bidang ini seperti manager, dosen, peneliti, dewan pengawas syariah, dll, ketimbang profesi usahawan yang merintis usaha dari bawah.

Sebagai ilustrasi, berikut sebaran mata kuliah di program studi Ekonomi Syari'ah FSEI IAIN SMH Banten.

a. Kompetensi Dasar

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER						
				I	II	III	IV	V	VI	VII
1	A14141101	Akhlaq Tasawuf	2	√						
2	A14141102	Bahasa Arab I	2	√						
3	A14141203	Bahasa Arab II	2		√					
4	A14141104	Bahasa Indonesia	2	√						
5	A14141105	Bahasa Inggris I	2	√						
6	A14141206	Bahasa Inggris II	2		√					
7	A14141207	Fiqh	2		√					
8	A14141308	Fiqh Ibadah I	2			√				
9	A14141409	Fiqh Ibadah II	2				√			
10	A14141110	Ilmu Kalam	2	√						
11	A14141111	Ilmu Sosial Dasar (ISD)	2	√						
12	A14141112	Metodologi Studi Islam (MSI)	2	√						

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER						
				I	II	III	IV	V	VI	VII
13	A14141113	Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)	3	√						
14	A14141114	Qiraah al-Qur'an wa Tahfidz (QQWT)	2	√						
15	A14141215	Sejarah Peradaban Islam (SPI)	2		√					
16	A14141216	Ulumul Qur'an	2		√					
17	A14141217	Ulumul Hadis	2		√					
18	A14141318	Ushul Fiqh	3			√				
Jumlah			38							

b. Kompetensi Utama

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER						
				I	II	III	IV	V	VI	VII
1	A14142101	Matematika Ekonomi I	3	√						
2	A14142202	Matematika Ekonomi II	3		√					
3	A14142103	Pengantar Ekonomi Mikro	2	√						
4	A14142204	Pengantar Ekonomi Makro	2		√					
5	A14142305	Pengantar Bisnis	2			√				
6	A14142206	Pengantar Manajemen	2		√					
7	A14142207	Pengantar Akuntansi	3		√					
8	A14142308	Teori Ekonomi	3			√				
9	A14142409	Teori Ekonomi Islam	3				√			
10	A14142410	Etika Bisnis Islam	2				√			
11	A14142611	Hukum Bisnis	2						√	
12	A14142312	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	3			√				
13	A14142513	Manajemen Sumber Daya Insani	2					√		
14	A14142314	Tafsir Ayat Ayat Ekonomi	2			√				

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	SEMESTER						
				I	II	III	IV	V	VI	VII
15	A14142415	Hadis Hadis Ekonomi	2				√			
16	A14142316	Fiqh Muamalat I	2			√				
17	A14142417	Fiqh Muamalat II	2				√			
18	A14142518	Ekonometri	3					√		
19	A14142519	Manajemen Keuangan	3					√		
20	A14142520	Manajemen Strategik	3					√		
21	A14142321	Manajemen Pemasaran Syariah	2			√				
22	A14142322	Aspek Hukum Dalam Ekonomi	2			√				
23	A14142423	Akuntansi Keuangan	3				√			
24	A14142424	Akuntansi Manajemen	3				√			
25	A14142425	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	2				√			
26	A14142526	Ekonomi Moneter	2					√		
27	A14142427	Ekonomi Manajerial	2				√			
28	A14142628	Manajemen Risiko	2						√	
29	A14142629	Manajemen LKS	2						√	
30	A14142630	Perbandingan Sistem Ekonomi	3						√	
31	A14142731	Skripsi	6							√
32	A14142732	Praktikum Profesi	3							√
33	A14142533	Keuangan Publik Islam *)	2					√		
34	A14142534	Ekonomi Internasional *)	2					√		
35	A14142635	Lembaga Perekonomian Umat *)	3						√	
36	A14142636	Perekonomian Indonesia *)	3						√	
Jumlah			91							

c. Kompetensi Pendukung/Lainnya

NO	KODE	MATA KULIAH	SK S	SEMESTER						
				I	II	III	IV	V	VI	VII
1	A14143501	Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis	3					√		
2	A14143302	Statistik I	3			√				
3	A14143403	Statistik II	3				√			
4	A14143604	Bahtsul Kutub	2						√	
5	A14143605	Bimbingan Penulisan Skripsi	2						√	
6	A14143206	Pengantar Ilmu Komputer	2		√					
7	A14143607	Aplikasi Komputer Ekonomi & Bisnis	2						√	
8	A14143708	Kukerta	4							√
9	A14143709	Komprehensif	0							√
10	A14143110	Praktik Qiraah	0	√						
11	A14143211	Praktik Komputer Perkantoran	0		√					
12	A14143312	Praktik Ibadah I	0			√				
13	A14143413	Praktik Ibadah II	0				√			
14	A14143514	Praktik Ekonometri Terapan	0					√		
15	A14143615	Praktik Komputer Bisnis Terapan	0						√	
16	A14143616	Arbitrase Syariah *)	2						√	
17	A14143617	Filsafat Ekonomi *)	2						√	
18	A14143518	Entrepreneurship *)	3					√		
19	A14143519	Perpajakan *)	3					√		
Jumlah			31							

Meskipun terdapat mata kuliah kewirausahaan sebagaimana tabel di atas, namun mata kuliah ini sifatnya hanyalah elektif (pilihan). Terlebih lagi bobot mata kuliah ini hanyalah 3 sks. Dengan sifatnya yang hanya fakultatif dan berbobot 3 sks, mata kuliah ini sulit diharapkan dapat menumbuh-kembangkan jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa FSEI.

Di samping itu, dari segi pedagogi, kebanyakan mata kuliah ini diajarkan dengan metode konvensional, seperti ceramah dimana dosen memberikah kuliah

dan mahasiswa mendengarkan yang sesekali diikuti dengan tanya jawab. Seandainya pun metode mahasiswa aktif diadopsi, kebanyakan mengambil bentuk diskusi dimana sekelompok mahasiswa bertugas membuat makalah dan presentasi di depan kelas lalu diikuti dengan diskusi seluruh kelas. Beragam metode yang dipaparkan di bab 3 sebagai pedagogi yang dianggap lebih cocok untuk pendidikan kewirausahaan belum diadopsi.

Demikian pula, meskipun terdapat pula pusat studi kewirausahaan di IAIN “SMH” Banten, pusat ini terbilang baru dan belum berkembang pesat. Program-program yang dilaksanakannya pun lebih banyak sebagai penyedia informasi akan kesempatan-kesempatan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilakukan lembaga lain yang mengundang para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh pihak internal kampus juga selama ini hanya bersifat ad-hoc dan belum menyentuh seluruh mahasiswa, mengingat terbatasnya kapasitas pelatihan.

E. Diskusi

Melihat kondisi obyektif di atas, maka perlu digagas konsep pendidikan (berwawasan) kewirausahaan di FSEI IAIN “SMH” Banten. Untuk hal ini tentu saja dibutuhkan *political will* dari tidak hanya pihak kampus tetapi juga lembaga otoritas seperti Kemenag untuk memfasilitasi berdirinya program studi kewirausahaan Islam baik dari perizinan maupun pendanaan. Website Diktis beberapa kali menurunkan tulisan yang berintikan keinginan Diktis untuk menumbuh-kembangkan pendidikan kewirausahaan di dunia perguruan tinggi Islam. Tentunya hal ini merupakan signal positif yang bisa terus ditindak-lanjuti sehingga program studi kewirausahaan/bisnis syariah dapat terwujud di lembaga pendidikan tinggi Islam, termasuk di IAIN “SMH” Banten.

Studi kelayakan awal yang lebih komprehensif juga perlu dilakukan untuk memetakan kebutuhan formasi dosen yang qualified di bidangnya, struktur kurikulum yang dapat membekali mahasiswa dengan berbagai karakter dan ketrampilan sebagai pengusaha handal, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta perekrutan mahasiswa. Mengingat profesi ini sangat berhubungan erat dengan sektor riil, perlu dibangun berbagai kerjasama dengan dunia usaha yang dapat digunakan oleh mahasiswa tidak hanya sebagai “laboratorium hidup” dari ilmu yang digelutinya, tetapi juga membangun networking yang dapat memfasilitasi mereka ketika akan memulai usahanya kelak.

Secara makro, pendidikan berwawasan kewirausahaan memiliki signifikansi di IAIN “SMH” Banten. Secara historis-geografis, Banten dikenal

sebagai kota pelabuhan, perdagangan, dan industri. Nilai-nilai warisan budaya wirausaha ini bisa dijadikan modal budaya (cultural capital) yang bisa dieksploitasi dalam rangka menumbuh-kembangkan kembali budaya wirausaha di kalangan masyarakat Banten. Banyak potensi kewirausahaan yang dapat ditumbuh-kembangkan di Banten dari potensi kelautan, potensi agraria, potensi industri, dan potensi sejarah-budaya. Di sektor kelautan, tidak hanya sumber daya alam maritim yang bisa dieksplor, seperti ikan dan makanan laut, tetapi juga potensi ekonomi dari berbagai pelabuhan laut yang ada dan dalam rencana untuk dikembangkan. Pelabuhan Banten memiliki peran strategis sebagai penghubung pulau Jawa dan Sumatra. Demikian pula rencana pembangunan pelabuhan internasional Bojonegoro dengan pusat pengolahan ikan. Belum lagi potensi wisata alam bahari yang sudah menggeliat dan masih bisa terus dikembangkan mengingat banyaknya wilayah-wilayah pesisir pantai Banten, khususnya di wilayah utara, yang indah dan memiliki daya tarik wisata. Pantai Anyer, Tanjung Lesung, Karang Bolong, dan lain-lain menawarkan potensi ekonomi yang bisa terus dikembangkan.

Di sektor agraria, wilayah selatan Banten yang mayoritas merupakan wilayah agraria juga memiliki potensi agri-bisnis yang dapat terus dikembangkan. Komoditas holtikultura seperti sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias masih memiliki potensi pengembangan yang luas. Beberapa jenis buah-buahan seperti durian, manggis, sawo, jambu air Cincalo, salak, pisang, rambutan, alpukat dan sebagainya dapat dikembangkan melalui konsep agribisnis. Banten bisa menjadi sentra penghasil buah-buahan sebagai pemasok utama kebutuhan Jakarta. Faktor kedekatan transportasi Jakarta-Banten, bisa menjadi keunggulan komparatif untuk dapat memenangkan persaingan dalam meraih pasar Jakarta.⁶⁴

Dari segi kuliner, Provinsi Banten juga sudah memiliki beberapa komoditas khas, seperti emping melinjo, gula aren dan sate bandeng, namun promosi yang tidak gencar menyebabkan produk agribisnis tersebut kurang dikenali. Bahkan warga Jakarta saja sangat sedikit yang mengenali sate bandeng, berbeda dengan makanan khas asal Bandung yang cepat populer di Jakarta. Padahal Bandung lebih jauh dari Jakarta daripada Serang. Strategi promosi menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan agribisnis, baik untuk pemasaran produk atau mendatangkan investor.

Saat inipun Banten telah berkembang menjadi salah satu sentra bisnis dan industri. Berbagai kawasan industri telah dan mulai dibangun di daerah-daerah seperti Cilegon, Balajara, dan Cikupa. Tentunya dengan berdirinya berbagai

industri di kawasan ini, menimbulkan berbagai peluang Bisnis seperti kebutuhan perumahan, lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, taman rekreasi, dan pusat perbelanjaan dengan berbagai aneka kebutuhan para residenya.

Secara sejarah-budaya, Banten juga memiliki potensi usaha yang menjanjikan. Banyak arkeologi-arkeologi Banten yang belum diinventarisir dan dikoleksi untuk kemudian bisa dijadikan cagar budaya yang kelak dapat menjadi potensi usaha pariwisata. Demikian pula berbagai wisata religi Banten masih bisa terus dikembangkan sehingga menjadi usaha pariwisata yang dapat memberikan kesejahteraan kepada wilayah sekitar.

Di samping itu Banten dengan penduduk mayoritas Muslim, memiliki potensi konsumen besar untuk produk-produk industri kreatif Islam, dengan muatan nilai-nilai Islami, meliputi fashion, beauty, kuliner, teknologi informasi, travel, terapi, sastra, film, musik, animasi, seni rupa dan press Islam.

Secara umum, dunia industri kreatif Muslim Indonesia telah menandai kebangkitan ekonomi Muslim di negara Muslim terbesar di dunia. Kelahiran kelas menengah Muslim sejak dekade 1970-an dan terus berkembang hingga masa reformasi ini telah melahirkan industri kreatif Muslim untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah ini akan komoditas-komoditas barang dan jasa. Berbeda dengan generasi sebelum, kelompok ini telah mengalami perubahan selera konsumsi dari komoditas yang sekedar hanya memenuhi fungsi-fungsi dasar kepada komoditas yang diproduksi dan dikemas secara lebih “halus”, estetik, modern, dan sophisticated.⁶⁵ Kondisi seperti ini tentu melahirkan peluang-peluang bisnis yang perlu dimanfaatkan dan terus dikembangkan oleh para generasi muda Muslim, termasuk para sarjana alumni perguruan tinggi Islam.

Namun di sisi lain, kondisi sosial budaya di masyarakat Banten masih menyisakan tantangan yang besar. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih cukup tinggi di Banten. Tingkat pendidikan pun masih relatif rendah dibandingkan daerah-daerah lain. Selain itu tingkat konservatisme budaya dan keagamaan juga relatif cukup tinggi di Banten, yang umumnya kurang kondusif untuk investasi usaha. Namun tentunya dengan membangun kesadaran masyarakat akan perlunya membangun potensi daerah disertai berbagai upaya-upaya konkrit untuk mensejahterakan masyarakat sambil terus meningkatkan pemerataan pendapatan, tantangan-tantangan ini diharapkan dapat diatasi.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Sebagai agama yang bervisikan keadilan dan kemaslahatan, Islam sangat menekankan perlunya membangun masyarakat sejahtera. Teks-teks Islam yang menyerukan untuk memakmurkan bumi dan mencari keutamaan di muka bumi menjadi landasan bagi etos kerja keras yang perlu dipegang oleh umat Islam yang impist di dalamnya kerja wirausaha. Profesi pengusahapun mendapat tempat istimewa tersendiri yang memiliki keutamaan dibandingkan profesi lain. Hal inipun telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang disamping menjalankan tugas kenabian juga menjalankan profesi pengusaha. Masa-masa awal Islam mencatat sejarah bagaimana tipologi pengusaha Muslim yang ideal ditunjang dengan tipologi lingkungan usaha ideal yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun demikian seiring perjalanan waktu, seiring semakin berakultasinya umat Islam dengan budaya-budaya lainnya, berbagai kombinasi faktor ekonomi, sosial, politik, budaya telah menghambat berkembangnya budaya wirausaha di kalangan umat Islam. Hal inilah yang menjelaskan mengapa terdapat gap antara nilai-nilai Islam dan kelangkaan budaya wirausaha di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, seiring berkembangnya Ekonomi Islam, berbagai kajian dilakukan untuk menumbuh-kembangkan kembali budaya wirausaha di kalangan umat Islam.

Sebagian besar literatur menyatakan bahwa karakter dan ketrampilan wirausaha bisa diajarkan melalui serangkaian proses pendidikan dan pelatihan. Pendidikan wirausaha berintikan pada kemampuan dan ketrampilan mengidentifikasi kesempatan bisnis, mengorganisasi sumber-sumber daya, dan menumbuh-kembangkan usaha. Setidaknya ada empat unit utama kluster mata kuliah yang diharapkan dapat menumbuh-kembangkan ketrampilan ini, yaitu: dasar-dasar kewirausahaan, kewirausahaan dan kreatifitas, kewirausahaan dan inovasi, dan perencanaan dan evaluasi proyek. Sebagai bidang ilmu yang lebih menekankan aspek praktik, pendidikan wirausaha lebih efektif disampaikan dengan pedagogi yang lebih menekankan sistem pembelajaran mahasiswa aktif, dimana mereka didorong untuk terlibat dan lebih banyak mengambil kendali atas proses pendidikan yang mereka jalani.

Kondisi obyektif pendidikan di lingkungan FSEI IAIN “SMH” Banten belum mengarah pada pendidikan yang (berwawasan) kewirausahaan. Padahal pendidikan ini memiliki urgensi yang signifikan untuk menciptakan sarjana yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta memiliki daya saing tinggi. Oleh karena itu diperlukan political will dari pihak otoritas kampus dan kemenag untuk

memfasilitasi berdirinya program studi kewirausahaan baik dari segi perizinan maupun pendanaan. Studi kelayakan yang lebih komprehensif juga dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan formasi dosen yang qualified, struktur kurikulum yang efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sistem rekrutmen mahasiswa serta jalinan kerjasama dengan berbagai stakeholders, khususnya dunia usaha yang akan menjadi “laboratorium hidup” dan sarana networking mahasiswa. Semoga semua ini bisa diwujudkan dalam rangka mempersiapkan generasi Muslim Indonesia yang berbudaya wirausaha.

2. Saran-Saran

Pihak-pihak berwenang, khususnya di lingkungan kampus IAIN “SMH” Banten dan Diktis Kemenag, perlu secara serius mengembangkan pendidikan (berwawasan) kewirausahaan Islam mengingat sangat signifikannya pendidikan ini dalam mengurangi tingkat pengangguran dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara.

Untuk merealisasikan hal ini tentu dibutuhkan kerja keras dari seluruh pihak pemangku kepentingan (stake holders) seperti pihak perguruan tinggi, pemerintah, dan khususnya dunia usaha (Triple Helix Perguruan Tinggi). Perguruan tinggi dapat memulai inisiatif ini dengan memanfaatkan jaringan alumni yang telah berhasil menjadi pengusaha untuk kemudian secara aktif terlibat dalam proses awal pembentukan program studi kewirausahaan Islam dengan berbagai alat kelengkapannya. Pihak pemerintah dapat memfasilitasi pendanaan dan penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga program studi dapat berkembang secara baik di masa depan. Sinergi dengan pihak dunia usaha dapat dilakukan dengan cara menjajaki dan menjalin berbagai kerjasama yang saling menguntungkan, termasuk menyediakan sarana pemagangan untuk para mahasiswa di lembaga-lembaga usaha mereka sebagai salah satu “laboratorium hidup” bagi para mahasiswa kewirausahaan.

Footnotes

¹ David McClelland, *The Achieving Society*, (n.p.: n.p., 1961).

² Lihat misalnya Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (London: George Allen & Unwin, 1978); Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, (New York: Basic Books, 2000).

³ Jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 10,5 juta jiwa, dan kemudian menurun menjadi 9,4 juta (2008) dan 9.2 juta (2009). Lihat <http://wirausahamandiri.co.id/en/about-background-13.html>, diakses pada 24 Februari 2014.

⁴ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, translated by Talcott Parsons (London: George Allen and Unwin, 1978); Max Weber, *Economy and Society*, edited by R. Gunther and C. Wittich (New York: Oxford University Press, 1968); Max Weber, *The Religion of India*, edited by H.H. Gerth and D. Martindale (Glencoe, Ill.: The Free Press, 1958).

⁵ Bryan S. Turner, *Weber and Islam: A Critical Study*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1974).

⁶ Dalam sebuah hadits yang banyak dikutip dinyatakan bahwa Nabi pernah bersabda bahwa, “99% persen rezeqi ada di perdagangan”.

⁷ Rodinson, *Islam and Capitalism*.

⁸ Wilson, “Islam and Business”.

⁹ M. Akbar, “Ideology, Environment and Entrepreneurship: Typologies from Islamic Texts and History”, *Journal of Entrepreneurship*, Vol. 2, No. 2, 1993, pp. 135-154.

¹⁰¹⁰ Sebuah hadits yang sering dikutip menyatakan bahwa “99% rezeki ada di perdagangan”. Kandungan hadits tersebut mendapatkan momentum saat ini di kalangan masyarakat yang berdagang “Jika ingin kaya, jangan jadi pekerja, jadilah pengusaha”.

¹¹ Seperti QS al-Jaatsiyah (45): 12-13, a;-Hijr (15): 19-22, al-An`am (6): 141, al-Najm (53): 39, al-Nur (24): 37, al-Jumu`ah (62): 9-10, dan al-Taubah (9): 24. Selain itu beberapa ayat Qur`an juga secara spesifik menyebutkan kata ‘bisnis/perdagangan’, seperti QS al-Nisa’ (4): 29, al-Baqarah (2): 282, al-Taubah (9): 24, al-Shaf (61): 10, Fatir (35): 20, al-Jumu`ah (62): 11 dan kata ‘jual- beli’, seperti al-Baqarah (2): 253 dan 275, Ibrahim (14): 37, al-Jumu`ah (62): 9.

¹² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester, UK: Islamic Foundation, 1992), h. 6-9.

¹³ G. Rice, “Islamic Ethics and the Implications for Business”, *Journal of Business Ethics*, Vol. 18, h. 345-358.

¹⁴ M.C. Bassiouni, “Business Ethics in Islam”, dalam P.M. Minus (Ed.), *The Ethics of Business in a Global Economy*, (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993, h. 117-122.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ W. Ballantyne, “Commercial Law: The Conflict in Shariah and Secular Law”, dalam S. Behdad and F. Nomani (Eds.), *Islam and Public Policy*, (London: JAI Press, 1997), h. 225-248.

¹⁷ Akbar, “Ideology, Environment, and Entrepreneurship”, h. 152.

¹⁸ *Ibid.*, h. 144-145.

¹⁹ *Ibid.*, h.

²⁰ *Ibid.*, h. 147.

²¹ Bryan S. Turner, *Weber and Islam: A Critical Study*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1974).

²² Akbar, “Ideology, Environment, and Entrepreneurship”, h. 147.

²³ *Ibid.* Pada masa ini bahkan beredar sebuah hadits, yang ditengarai palsu, “Seorang penguasa dzalim lebih baik daripada kondisi kekacauan”.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Turner, *Weber and Islam*.

²⁶ Maxime Rodinson, *Islam and Capitalism*, (Paris: Penguin Books, 1966).

²⁷ Turner, *Weber and Islam*.

²⁸ Akbar, “Ideology, Environment, and Entrepreneurship”, h. 147.

²⁹ Turner, *Weber and Islam*, h. 126.

³⁰ Akbar, “Ideology, Environment, and Entrepreneurship”.

³¹ *Ibid.*

³² Ibn Khaldun, *Muqaddimah*.

³³ Scott Shane and S. Venkataraman, “The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research”, *Academy of Management Review*, Vol. 25, No. 1, 2000, h. 217-226.

³⁴ C.L. Noll, “Planning Curriculum for Entrepreneurship Education”, *Business Education Forum*, Vol. 47, No. 3, 1993, h. 3-6.

³⁵ Marilyn L. Kourilsky, *Entrepreneurship Education: Opportunity in Search of Curriculum*, (Kansas City, MO: Ewing Marion Kauffman Foundation, 1995), h. 10

³⁶ M.L. Kourilsky, *Entrepreneurship Education: Opportunity in Search of Curriculum*, (Kansas: Center for Entrepreneurial Leadership, 1995).

³⁷ E. Gottleib and J.A. Ross, “Made Not Born: HBS Courses and Entrepreneurial Management”, *Harvard Business School Bulletin*, Vol. Vol. 73, Feb 1997, h. 41-45.

³⁸ Colin Jones and Jack English, “A Contemporary Approach to Entrepreneurship Education”, *Education + Training*, Vol. 46, No. 8/9, 2004, h. 417/416-423.

³⁹ J.A. Timmons, *The Entrepreneurial Mind*, (Andover, MA: Brick House, 1989), h. 1.

⁴⁰ Magnus Aronsson, “Education Matters—but Does Entrepreneurship Education? An Interview with David Birch”, *Academy of Management Learning and Education*, Vol. 3, No. 3, 2004, h. 289-292.

⁴¹ Lihat misalnya Gorman et al., “Some Research Perspectives on Entrepreneurship Education, Enterprise Education and Education for Small Business Management: A Ten-Year Literature Review”, *International Small Business Journal*, Vol. 15, No. 3, 1997, pp. 56-77; Katz, “Education and Training in Entrepreneurship”, in Baum, et. al (Eds.), *The Psychology of Entrepreneurship*, (NJ: Elbaum, 2007), pp. 209-235; L. Pittaway and J. Cope, “Entrepreneurship Education: A Systematic Review of the Evidence”, *International Small Business Journal*, Vol. 25, 2007, pp. 479-510; Allan Gibb, “Creating Conducive Environment for Learning and Entrepreneurship: Living with, Dealing with, Creating and Enjoying Uncertainty and Complexity”, *Industry and Higher Education*, Vol. 16, No. 3, h. 135-148.

⁴² Leo Paul Dana, “The Education and Training of Entrepreneurs in Asia”, *Education and Training*, Vol. 43, No. 8/9, 2001, h. 405/405-415.

⁴³ David Kirby, “Changing the Entrepreneurship Education Paradigm”, Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2007), h. 21-45.

⁴⁴ D.M. Ray, “Teaching Entrepreneurship in Asia: Impact of Pedagogical Innovation”, *Entrepreneurship Innovation and Change*, Vol. 6, No. 3, 1997, h. 193-227.

⁴⁵ Kirby, “Changing the Entrepreneurship Education Paradigm”.

-
- ⁴⁶ D. Lewis, *Mind Skills: Giving Your Child a Brighter Future*, (London: Souvenir Press, 1987), h. 41.
- ⁴⁷ D. A. Kirby, *Entrepreneurship*, (Maidenhead: McGraw-Hill, 2003).
- ⁴⁸ A. A. Gibb, "Entreprise Culture—Its Meaning and Implications for Education and Training", *Journal of European Industrial Training*, Vol. 11, No. 2, 1987, h. 3-38.
- ⁴⁹ P. Olson and D. Bosserman, "Attributes of the Entrepreneurial Type", *Business Horizons*, May-June 1984, h. 53/53-56.
- ⁵⁰ de Bono, *Lateral Thinking: Creativity Step-by-Step*, (New York: Harper and Row, 1970).
- ⁵¹ D.A. Kirby, "Creating Entrepreneurial Universities in the UK: Applying Entrepreneurship Theory to Practice", *Journal of Technology Transfer*, 31, 2006, h. 599-603.
- ⁵² B. Johannisson, "University training for Entrepreneurship: Swedish Approaches", *Entrepreneurship and Regional Development*, Vol. 3, No 1, 1991, h. 79/67-82.
- ⁵³ D.A. Kirby, "Entrepreneurship Education: Can Business School Meet The Challenge?", in E. Genesca, D. Urbano, J.L. Capelleras, C. Gualarte and J. Verges (eds.), *Entrepreneurship: Homage to Professor J.M. Veciana Verges*, (Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, h. 371.
- ⁵⁴ P. Albert and L. Gaynor, "National Contexts, Incubator Families and Trends in Incubation—views from Four Countries", Paper Presented at the 48th ICSB World Conference, Belfast, 2003, h. 2003, h. 20.
- ⁵⁵ K.H. Vesper and W.B. Gartner, *University Entrepreneurship Programs*, (Lloyd Greif Center for Entrepreneurial Studies, Marshall School of Business, University of Southern California, Los Angeles, CA, 2001).
- ⁵⁶ W. Ed McMullan and Wayne A. Long, "Entrepreneurship Education in the Nineties", *Journal of Business Venturing*, Vol. 2, 1987, h. 262.
- ⁵⁷ Kevin Hindle, "Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building to the Right Philosophy", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 110/104-126.
- ⁵⁸ Alfred North Whitehead, *The Aims of Education and Other Essays*, (New York: The Free Press, 1929, Reprinted 1967), h. 93.
- ⁵⁹ Kevin Hindle, "Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building To the Right Philosophy", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 110/104-126.
- ⁶⁰ Kevin Hindle, "Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building To the Right Philosophy", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 111/104-126.
- ⁶¹ Kevin Hindle, "Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building To the Right Philosophy", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 111-112.
-

⁶² Camille Carrier, "Strategies for Teaching Entrepreneurship: What Else Beyond Lectures, Case Studies and Business Plans?", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 143-159.

⁶³ Allan Gibb, "Creating the Entrepreneurial University: Do We Need a Wholly Different Model of Entrepreneurship?", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 67-103; Kevin Hindle, "Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building to the Right Philosophy", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar), h. 104-126.

⁶⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Profil Potensi Investasi Provinsi Banten*, diunduh dari <http://regionalinvestment.com/newsipid/userfiles/ppi/PROFIL%20POTENSI%20INVESTASI%20PROVINSI%20BANTEN%202009.pdf>, pada 1 Juli 2014.

⁶⁵ Haidar Bagir, "Kebangkitan Industri Kreatif Muslim", *Gatra*, No. 42, 43, Tahun XVII, 25 Agustus - 7 September 2011, h. 126-127.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Gibb, "Entreprise Culture—Its Meaning and Implications for Education and Training", *Journal of European Industrial Training*, Vol. 11, No. 2, 1987
- Akbar, "Ideology, Environment, and Entrepreneurship"
- Alfred North Whitehead, *The Aims of Education and Other Essays*, (New York: The Free Press, 1929, Reprinted 1967)
- Allan Gibb, "Creating the Entrepreneurial University: Do We Need a Wholly Different Model of Entrepreneurship?", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar
- Kevin Hindle, "Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building to the Right Philosophy", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar)
- B. Johannisson, "University training for Entrepreneurship: Swedish Approaches", *Entrepreneurship and Regional Development*, Vol. 3, No 1, 1991
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Profil Potensi Investasi Provinsi Banten*, diunduh dari <http://regionalinvestment.com/newsipid/userfiles/ppi/PROFIL%20POTENSI%20INVESTASI%20PROVINSI%20BANTEN%202009.pdf>, pada 1 Juli 2014.
- Bryan S. Turner, *Weber and Islam: A Critical Study*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1974).
- C.L. Noll, "Planning Curriculum for Entrepreneurship Education", *Business Education Forum*, Vol. 47, No. 3, 1993
- Camille Carrier, "Strategies for Teaching Entrepreneurship: What Else Beyond Lectures, Case Studies and Business Plans?", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A*

-
- General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar)
- Colin Jones and Jack English, "A Contemporary Approach to Entrepreneurship Education", *Education + Training*, Vol. 46, No. 8/9, 2004, h. 417/416-423.
- D. A. Kirby, *Entrepreneurship*, (Maidenhead: McGraw-Hill, 2003).
- D. Lewis, *Mind Skills: Giving Your Child a Brighter Future*, (London: Souvenir Press, 1987)
- D.A. Kirby, "Creating Entrepreneurial Universities in the UK: Applying Entrepreneurship Theory to Practice", *Journal of Technology Transfer*, 31, 2006
- D.A. Kirby, "Entrepreneurship Education: Can Business School Meet The Challenge?", in E. Genesca, D. Urbano, J.L. Capelleras, C. Guallarte and J. Verges (eds.), *Entrepreneurship: Homage to Professor J.M. Veciana Verges*, (Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
- D.M. Ray, "Teaching Entrepreneurship in Asia: Impact of Pedagogical Innovation", *Entrepreneurship Innovation and Change*, Vol. 6, No. 3, 1997
- Dalam sebuah hadits yang banyak dikutip dinyatakan bahwa Nabi pernah bersabda bahwa, "99% persen rezeqi ada di perdagangan".
- David Kirby, "Changing the Entrepreneurship Education Paradigm", Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2007)
- David McClelland, *The Achieving Society*, (n.p.: n.p., 1961).
- de Bono, *Lateral Thinking: Creativity Step-by-Step*, (New York: Harper and Row, 1970).
- E. Gottleib and J.A. Ross, "Made Not Born: HBS Courses and Entrepreneurial Management", *Harvard Business School Bulletin*, Vol. Vol. 73, Feb 1997
- G. Rice, "Islamic Ethics and the Implications for Business", *Journal of Business Ethics*, Vol. 18
-

Haidar Bagir, “Kebangkitan Industri Kreatif Muslim”, *Gatra*, No. 42, 43, Tahun XVII, 25 Agustus - 7 September 2011

Ibn Khaldun, *Muqaddimah*.

J.A. Timmons, *The Entrepreneurial Mind*, (Andover, MA: Brick House, 1989)

Jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 10,5 juta jiwa, dan kemudian menurun menjadi 9,4 juta (2008) dan 9.2 juta (2009). Lihat <http://wirausahamandiri.co.id/en/about-background-13.html>, diakses pada 24 Februari 2014.

K.H. Vesper and W.B. Gartner, *University Entrepreneurship Programs*, (Lloyd Greif Center for Entrepreneurial Studies, Marshall School of Business, Univeristy of Southern California, Los Angeles, CA, 2001).

Kevin Hindle, “Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building to the Right Philosophy”, Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar).

Kevin Hindle, “Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building To the Right Philosophy”, Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar)

Kevin Hindle, “Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building To the Right Philosophy”, Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar)

Kevin Hindle, “Teaching Entrepreneurship at University: From the Wrong Building To the Right Philosophy”, Alain Fayolle (ed.), *Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Volume 1: A General Perspective*, (Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar)

Kirby, “Changing the Entrepreneurship Education Paradigm”.

Leo Paul Dana, “The Education and Training of Entrepreneurs in Asia”, *Education and Training*, Vol. 43, No. 8/9, 2001

Gorman et al., “Some Research Perspectives on Entrepreneurship Education, Enterprise Education and Education for Small Business Management: A

-
- Ten-Year Literature Review”, *International Small Business Journal*, Vol. 15, No. 3, 1997
- Katz, “Education and Training in Entrepreneurship”, in Baum, et. al (Eds.), *The Psychology of Entrepreneurship*, (NJ: Elbaum, 2007)
- L. Pittaway and J. Cope, “Entrepreneurship Education: A Systematic Review of the Evidence”, *International Small Business Journal*, Vol. 25, 2007
- Allan Gibb, “Creating Conducive Environment for Learning and Entrepreneurship: Living with, Dealing with, Creating and Enjoying Uncertainty and Complexity”, *Industry and Higher Education*, Vol. 16, No. 3
- Lihat misalnya Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (London: George Allen & Unwin, 1978); Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*, (New York: Basic Books, 2000).
- M. Akbar, “Ideology, Environment and Entrepreneurship: Typologies from Islamic Texts and History”, *Journal of Entrepreneurship*, Vol. 2, No. 2, 1993
- M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester, UK: Islamic Foundation, 1992)
- M.C. Bassiouni, “Business Ethics in Islam”, dalam P.M. Minus (Ed.), *The Ethics of Business in a Global Economy*, (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993)
- M.L. Kourilsky, *Entrepreneurship Education: Opportunity in Search of Curriculum*, (Kansas: Center for Entrepreneurial Leadership, 1995).
- Magnus Aronsson, “Education Matters—but Does Entrepreneurship Education? An Interview with David Birch”, *Academy of Management Learning and Education*, Vol. 3, No. 3, 2004
- Marilyn L. Kourilsky, *Entrepreneurship Education: Opportunity in Search of Curriculum*, (Kansas City, MO: Ewing Marion Kauffman Foundation, 1995)
- Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, translated by Talcott Parsons (London: George Allen and Unwin, 1978); Max Weber,
-

Economy and Society, edited by R. Gunther and C. Wittich (New York: Oxford University Press, 1968); Max Weber, *The Religion of India*, edited by H.H. Gerth and D. Martindale (Glenco, Ill.: The Free Press, 1958).

Maxime Rodinson, *Islam and Capitalism*, (Paris: Penguin Books, 1966).

P. Albert and L. Gaynor, “National Contexts, Incubator Families and Trends in Incubation—views from Four Countries”, Paper Presented at the 48th ICSB World Conference, Belfast, 2003, h. 2003

P. Olson and D. Bosserman, “Attributes of the Entrepreneurial Type”, *Business Horizons*, May-June 1984

Rodinson, *Islam and Capitalism*.

Scott Shane and S. Venkataraman, “The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research”, *Academy of Management Review*, Vol. 25, No. 1, 2000

Turner, *Weber and Islam*

W. Ballantyne, “Commercial Law: The Conflict in Shariah and Secular Law”, dalam S. Behdad and F. Nomani (Eds.), *Islam and Public Policy*, (London: JAI Press, 1997)

W. Ed McMullan and Wayne A. Long, “Entrepreneurship Education in the Nineties”, *Journal of Business Venturing*, Vol. 2, 1987

Wilson, “Islam and Business”.

